

Efektivitas Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Pidie

Mahathir Muhammad

¹Ilmu Administrasi Publik, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Jl. Muchtar Basri No. 3, Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara

muhammadmahathir@gmail.com

Abstrak

Pentingnya registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor di Samsat Pidie untuk tertib pelaksanaan administrasi data kendaraan bermotor. Seluruh pengguna kendaraan bermotor harus meliputi data dan setiap kendaraan wajib memasang tanda nomor kendaraan bermotor atau pelat nomor sesuai peraturan. Pelat yang di terbitkan dari pihak kepolisian berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada kendaraan bermotor. Tujuannya melaksanakan pengendalian dan pengawasan kendaraan di Aceh yang masih menggunakan pelat kendaraan dari provinsi lain agar mengregistrasikan dan identifikasi kendaraannya ke pelat BL (Aceh) untuk mempermudah penyidikan kepemilikan kendaraan bermotor. Pelaksanaan Registrasi dan Identifikasi kendaraan bermotor akan mempermudah petugas pajak untuk mendapatkan data yang valid terkait registrasi kendaraan yang akan dibayarkan pajaknya oleh pemiliknya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan analisa kualitatif yaitu prosedur pemecah masalah yang di teliti dengan pengamatan dengan cara menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana adanya. Hasil penelitian menunjukkan prosedur serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban registrasi dan identifikasi kendaraan masyarakat di kabupaten Pidie. Untuk pentingnya informasi kepemilikan kendaraan agar kendaraan-kendaraan yang beroperasi di jalan raya semua terdata terregistrasi dan teridentifikasi semua di Samsat Pidie. Namun kenyataan masyarakat masih memakai pelat kendaraan Provinsi lain, yang mengakibatkan pajak kendaraan bukan masuk ke kas daerah Pidie. Sehingga sistem registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor tidak berjalan efektif.

Kata Kunci: *Efektivitas, Regiden Kendaraan Bermotor.*

1. PENDAHULUAN

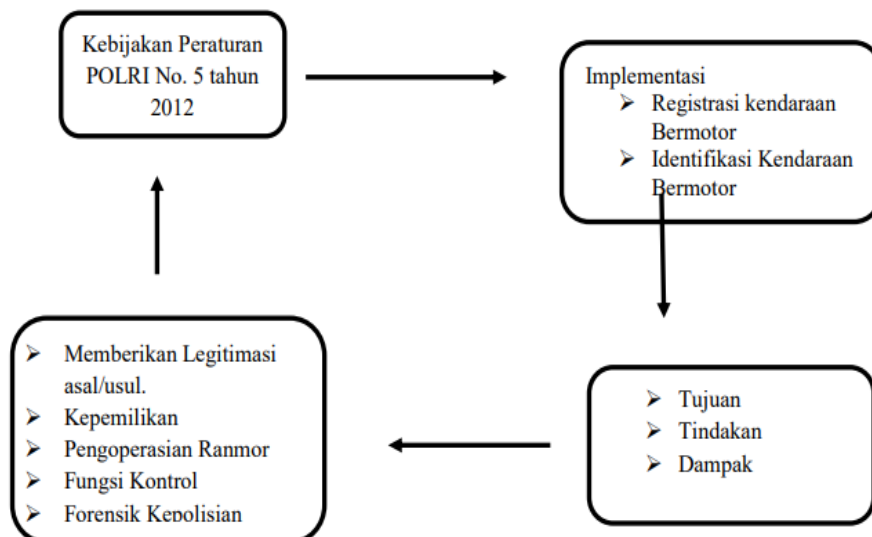
Indonesia merupakan negara berkembang yang masyarakatnya memiliki pola hidup yang konsumtif terhadap penggunaan kendaraan. Setiap kendaraan wajib memasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau pelat nomor yang sesuai ketentuan. Peraturan menggunakan TNKB secara resmi tentu memiliki tujuan baik bagi masyarakat, diantaranya yaitu untuk menjamin kepemilikan warga negara dan mempermudah penelusuran apabila kendaraan tersebut terkait kasus tindak pidana. Namun dalam kenyataannya masih banyak kendaraan roda empat yang menggunakan TNKB yang tidak sesuai aturan atau standar. TNKB merupakan tanda registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor yang telah di beli harus meliputi dengan Registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan Kepolisian atau lebih familiar dengan pelaksanaan tugas POLRI di SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) adalah bertujuan untuk melaksanakan tertib administrasi data kendaraan bermotor, melaksanakan pengendalian dan pengawasan Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Indonesia, mempermudah penyidikan pelanggaran dan kejahatan, perencanaan, operasional Manajemen dan Rekayasa, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan perencanaan pembangunan nasional.

Tugas kepolisian tak hanya itu saja melainkan mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan, dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Para petugas kepolisian pada tingkat pelaksana menindaklanjuti kebijakan-kebijakan pimpinan terutama yang berkaitan dengan pelayanan di bidang SIM, STNK, BPKB dan penyidikan kecelakaan lalu lintas. undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang digagas oleh Departemen Perhubungan, dibuat agar penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai, sejalan dengan kondisi dan kebutuhan penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan saat ini, serta harmoni dengan undang-undang lainnya. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf (e) dinyatakan: "Bahwa tugas pokok dan fungsi polri dalam hal penyelenggaraan lalu lintas sebagai suatu : "Urusan pemerintah dibidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakkan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas".

Namun, sayangnya tidak diikuti dengan kesadaran pemilik kendaraan masih banyak kendaraan yang belum tertib administratif atau belum ter-registrasi secara baik ini lah yang di dimanfaatkan sejumlah orang sehingga mengakibatkan plat ganda. Plat ganda yang dimaksud berupa nomor rangka kendaraan satu (satu kendaraan) mempunyai dua plat dan ada pula dua kendaraan memiliki satu plat. Hal itulah yang dapat menyebabkan permasalahan pemilik kendaraan dan juga data yang ganda pula. Pengaruh Pelaksanaan Registrasi dan Identifikasi kendaraan bermotor akan mempermudah petugas pajak untuk mendapatkan data yang valid terkait registrasi kendaraan yang akan dibayarkan pajaknya oleh pemiliknya. Sehingga tidak ada wajib pajak kendaraan yang tidak terdata.. Namun hal tersebut belum berjalan dengan baik karena berbagai faktor baik dari Ditlantas maupun dari Dispenda. Faktor-faktor tersebut adalah jumlah personil yang terbatas yang melakukan Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.

2. METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode Deskriptif dengan analisa data kualitatif yaitu pengolahan data yang didasarkan pada hasil studi lapangan yang kemudian dipadukan dengan data yang di peroleh dari wawancara sehingga nantinya memperoleh data yang akurat. Mengenai Implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Tentang Pelaksana registrasi dan identifikasai kendaraan bermotor di Kabupaten Pidie. Sedangkan terhadap permasalahannya dilakukan sosialisasi yuridis-empiris .yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat. konsep yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Undang-undang Kepala Kepolisian No. 5 Tahun 2012 dalam rangka pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor di Kabupaten Pidie. Agar konsep tersebut dapat dijelaskan, maka kerangka konsep dirangkum dalam sebuah gambar yang mewakili pola pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konsep

Untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini digunakan teknik analisis dengan pendekatan kualitatif. Analisis kualitatif bermakna sebagai satu pengertian analisis yang didasarkan pada data yang di peroleh data, baik melalui studi lapangan maupun data yang di peroleh melalui studi pustaka. Di dalam menganalisisnya tidak menggunakan perhitungan-perhitungan kuantitatif, tetapi pada kemampuan nalar peneliti dalam menghubungkan-hubungkan fakta, data ini informasi. Kemudian data yang diperoleh akan di susun secara sistematis pada setiap kategori. Kecenderungan masing-masing kategori analisis sehingga di harapkan muncul gambaran yang dapat mengungkapkan permasalahan penelitian. Selain itu, juga dilakukan analisis terhadap jawaban responden pada Questioner yang telah diberikan tentang Implementasi peraturan registrasi dan identifikasi kendaraan.

3. HASIL

Analisis

Data Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui wawancara terhadap narasumber, selanjutnya dapat diperoleh data yang berhubungan erat dengan kategorisasi.

Adanya tujuan yang ingin dicapai

Adanya satu tujuan yaitu segala yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara baku (sama) agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama untuk mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

- a. peraturan kepala kepolisian Republik Indonesia nomor 5 tahun 2012 tentang pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor di Kabupaten Pidie? Hasil wawancara dengan Bapak Hamdani, SH selaku tugas di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan menjelaskan bahwa tujuan SAMSAT Pidie Dalam hal proses penyidikan pelanggaran dan kejahatan yang menjadi esensi utama fungsi Regident Ranmor dalam menunjang tugas Kepolisian sebagai Pelindung, Pengayom, Pelayan dan Penegak Hukum di Masyarakat adalah sangat penting dimana kecepatan akses data, validitas data dan kerahasiaan data kendaraan bermotor sangat dibutuhkan selama proses penyelidikan yang dilakukan Polri untuk mengungkap suatu kasus kejahatan.
- b. Bagaimana cara mencapai tujuan dari pelaksanaan peraturan tersebut? Berdasarkan hasil wawancara Bapak Hamdani, SH selaku tugas di bidang Registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan Kepolisian atau lebih familiar dengan pelaksanaan tugas POLRI di SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) adalah bertujuan untuk melaksanakan tertib administrasi data kendaraan bermotor, melaksanakan pengendalian dan pengawasan Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Indonesia, mempermudah penyidikan pelanggaran dan kejahatan, perencanaan, operasional Manajemen dan Rekayasa, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan perencanaan pembangunan nasional. Tujuan dari implementasi tersebut tentunya harus dibarengi oleh keberadaan sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan. Sumber daya merupakan unsur penting dalam pelaksanaan kebijakan. Keberadaan sumber daya menjadi kebutuhan mutlak agar tujuan kebijakan pemerintah dapat terealisasikan. Pencapaian tujuan akan ditentukan oleh kualitas dari sumber daya itu sendiri.
- c. Siapa saja yang terlibat dalam mencapai tujuan dari pelaksanaan tersebut? Hasil wawancara Bapak Hamdani, SH selaku tugas di bidang Registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor Dispenda, Kepolisian, Jasa Raharja Hasil wawancara dengan Bapak Syahrul Ramadhan, SE selaku kepala SAMSAT Pidie Dispenda, Kepolisian, Jasa Raharja. Hasil wawancara dengan Bapak Bustami selaku masyarakat Kecamatan Padang Tiji Pemerintah Kabupaten Pidie, dan Intansi Birokrasi Kepemerintahan.
- d. Kendala apa yang ditemukan dalam pelaksanaan peraturan ini? Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hamdani, SH selaku tugas di bidang Registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor Gangguan memasukan data melalui komputer dikarenakan offline jaringan internet. Berdasarkan hasil wawancara Bapak Syahrul Ramadhan, SE selaku kepala SAMSAT Pidie sampai sekarang tidak ada kendala yang sangat berarti hanya saja kendala-kendala pada

jaringan untuk menginput data. tetapi belum adanya peraturan hukum yang secara khusus mengatur tentang penerbitan plat nomor kendaraan pilihan dan biaya lain-lain, dengan tidak adanya peraturan tersebut, hal ini bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas keterbukaan dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Adanya tindakan atau strategi dalam pengimplementasian

- a. Tindakan atau strategi apa yang diterapkan samsat di bagian registrasi dan identifikasi kendaraan untuk mengimplementasikan peraturan ini?

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syahrul Ramadhan, SE selaku kepala SAMSAT Pidie yang perlu dilakukan terhadap tindakan strategisnya dengan cara memberikan kebutuhan bagi masyarakat disaat melaksanakan registrasi dan identifikasi kendaraan di SAMSAT Pidie. Contoh seperti SAMSAT keliling untuk setiap minggunya petugas hadir di Kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Pidie. Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor adalah fungsi Kepolisian untuk memberikan legitimasi asal usul dan kelaikan, kepemilikan sertapengoperasian Ranmor, fungsi kontrol,forensik Kepolisian dan pelayanan kepadamasyarakat melalui verifikasi, pencatatandan pendataan, penomor, penerbitan dan pemberian bukti registrasi dan identifikasi Ranmor, pengarsipan serta pemberian informasi. Bapak Bustami selaku masyarakat Kecamatan Padang Tiji aktifkan selalu SAMSAT keliling agar masyarakat yang ada di kampung atau di desa-desa tidak perlu lagi ke kota untuk pengurusan administrasi atau registrasi kendaraan kembali.Registrasi adalah suatu kegiatan pencatatan yang dilakukan pertama kali pada saat melakukan pendaftaran.Pengertian pendaftaran disini pada dasarnya hanya untuk memperlancar dan mempermudah dalam proses pendaftaran kendaraan bermotor.

- b. Mengapa tindakan atau strategi ini di pilih untuk di implementasikan dalam peraturan KAPOLRI?

Bapak Bustami masyarakat kecamatan padang tiji undang undang yang telah berlaku sudah berjalan dengan baik dan di berlakukan dengan benar. Registrasi adalah suatu kegiatan pencatatan yang dilakukan pertama kali pada saat melakukan pendaftaran.Pengertian pendaftaran disini pada dasarnya hanya untuk memperlancar dan mempermudah dalam proses pendaftaran kendaraan bermotor.

- c. Bagaimana cara menerapkan tindakan atau strategi yang di pilih untuk di implementasikan?

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Hamdani, SH selaku tugas di bidang Registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor Awal untuk regiden Penetapan untuk menerbitkan dan percetakan STNK (Polri), tahap akhir pengeluaran cetak. Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, sertamereka mempunyai komitmen untuk melakukannya. Implementasi kebijakan bisajadi masih belum efektif karena adanya defisiensi struktur birokrasi. Bapak Syahrul Ramadhan, SE selaku kepala SAMSAT PidieMengoperasionalkan kendaraan bermotor di jalan raya perlu ada legitimasinya yang terkait sistem STNK maupun TNKB (tanda nomor kendaraan bermotor).

- d. Apa yang menjadi kendala dalam menjalankan tindakan atau strategi tersebut?

Bapak Hamdani, SH selaku tugas di bidang Registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor Pada saat ini Samsat Pidie tidak memiliki kendala dalam peraturan KAPOLRI tentang Registrasi dan identifikasi kendaraan di Kabupaten Pidie.

Bapak Syahrul Ramadhan, SE selaku kepala SAMSAT Pidie sementara saat ini belum ada kendala.

Bapak Bustami masyarakat Kecamatan Padang Tiji dari segi mekanisme sekarang petugas tidak memiliki kendala. Kewenangan juga merupakan sumber daya lain yang mempengaruhi implementasi Kebijakan.

Kewenangan sangat diperlukan, terutama untuk menjaminkan meyakinkan bahwa kebijaksanaan yang akan dilaksanakan adalah sesuai dengan Kebijakan yang berlaku. Kewenangan ini menjadi penting kehadirannya ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan

Adanya dampak dari pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan

- a. Bagaimana dampak yang dirasakan samsat dari pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan ini?

Bapak Hamdani, SH selaku tugas di bidang Registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor Sistem registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor ialah memudahkan mengetahui kendaraan yang sudah Teregistrasi agar semua kendaraan dapat tercatat dengan baik karena besar nya pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus terlaksana dengan baik dan benar. Bapak Syahrul Ramadhan, SE selaku kepala SAMSAT Pidie 1. penyediaan data forensik kepolisian untuk mendukung penyidikan kejahatan yang terkait dengan Ranmor 2. penyediaan data untuk dukungan proses penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas

- b. Apakah ada upaya yang dilakukan untuk memaksimalkan dampak yang di terima samsat dari peraturan KAPOLRI tentang registrasi dan identifikasi kendaraan di kabupaten pidie?

Bapak Hamdani, SH selaku tugas di bidang Registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor tertib administrasi data kendaraan bermotor, melaksanakan pengendalian dan pengawasan Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Indonesia, mempermudah penyidikan pelanggaran dan kejahatan, pemblokiran data kendaraan yang kasus di kepolisian. Sumber daya merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan. Sumber daya manusia atau staff harus cukup baik secara jumlah maupun cakap dalam mengerjakan tugasnya. Efektivitas pelaksanaan kebijakan sangat tergantung kepada sumber daya manusia (aparatur) yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan. Walaupun aturan main pelaksanaan kebijakan telah di transformasikan dengan tepat, tetapi sumber daya manusia terbatas baik dari jumlah maupun keahlian maka pelaksanaan kebijakan tidak akan berjalan efektif

- c. Pihak-pihak mana saja yang dapat merasakan dampak pelaksanaan tersebut?

Hasil wawancara Bapak Hamdani, SH selaku tugas di bidang Registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor Masyarakat (Pembangunan) Pemerintah Daerah (Pendapatan Kas Daerah) Ketenagakerjaan (Gaji pegawai Daerah).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan diatas dapat disimpulkan bahwa tidak ada konsistensi komunikasi. Kerana komunikasi tersebut tidak menunjukkan proses penyampaian pesan dari sumber kepada

penerima. Oleh karena itu, komunikasi tidak akan berhasil dengan baik apabila pesan yang disampaikan tidak dapat dimengerti oleh penerima pesan. Komunikasi merupakan suatu konsep yang dapat dimaknai sebagai sebuah proses dimana adanya interaksi antara lembaga atau birokrat dengan lembaga/instansi masyarakat.

4. PEMBAHASAN

Peranan Registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor sangatlah penting dimiliki oleh Kepolisian salah satunya dalam hal pengungkapan kasus kejahatan yang menjadi esensi utama fungsi regident ranmor Polri sehingga wacana pengalihan kewenangan terkait Regident Ranmor seperti yang ramai dibicarakan netizen beberapa pekan lalu terkait gugatan kewenangan Polri dalam hal penerbitan SIM, STNK, BPKB yang diajukan perwakilan LSM ke Mahkamah Konstitusi tidaklah tepat mengingat keberhasilan Polri dalam mengungkap kasus-kasus besar berskala Nasional bahkan Internasional sudah terbukti nyata dan diakui secara nasional maupun manca negara.

Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya jajaran Korps Lalu Lintas merupakan Lembaga Negara yang bertanggung jawab terhadap proses penegakkan hukum penanganan kecelakaan berlalu lintas, Dalam perkembangan peradapan manusia di Indonesia Budaya Tabrak Lari sudah ada sejak dahulu dimana budaya ini berkembang hanya pada sebagian kecil masyarakat yang tidak memiliki rasa tanggung jawab, rasa empati, rasa kemanusiaan, tidak sadar hukum, namun pada sebagian besar masyarakat masih menolak pelaku Tabrak Lari bahkan tak sedikit para pelaku tabrak lari yang tertangkap oleh masyarakat sendiri diamuk masa sebagai bentuk hukum sosial yang terjadi ditengah masyarakat, Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Dalam hal terjadinya kecelakaan lalu lintas setiap insan manusia khususnya yang berada pada teritorial hukum Indonesia yang mendengar, melihat dan mengetahui terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas diwajibkan untuk memberikan pertolongan kepada korban Kecelakaan Lalu Lintas.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan olehpeneliti pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik beberapakesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Sistem Manajemen Registrasi dan Identifikasi (Regident) Kendaraan Bermotor dalam kaitannya dengan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pidie adalah fungsi Kepolisian untuk memberikan legitimasi asal usul dan kelaikan, kepemilikan serta pengoperasian Ranmor, fungsi kontrol, forensik Kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat melalui verifikasi, pencatatan dan pendataan, penomoran, penerbitan dan pemberian bukti registrasi dan identifikasi Ranmor, pengarsipan serta pemberian informasi dan pemilik kendaraan tersebut sudah mempunyai jumlah tanggungan kendaraan yang harus dibayarkan tiap tahun, yang lebih dikenal dengan Pajak Kendaraan Bermotor, penentuan besaran pajak tersebut dilakukan oleh Petugas. Registrasi dan Identifikasi kendaraan bermotor akan mempermudah petugas pajak untuk mendapatkan data yang valid terkait registrasi kendaraan yang akan dibayarkan pajaknya oleh pemiliknya. Sehingga tidak ada wajib pajak kendaraan yang tidak terdata. Pemungutan pajak kendaraan bermotor sangat vital dalam menyumbang pendapatan asli daerah.

Karena pada proses tahapan yang dilakukan pada saat Registrasi dan Identifikasi kendaraan bermotor, pemilik kendaraan tersebut atau wajib pajak sudah memiliki kewajiban membayar Pajak kendaraan bermotor setelah penetapan Pajak kendaraan bermotor diberlakukan. Dalam pelaksanaannya selama ini belum maksimal karena keterbatasan jumlah personel sehingga kurang Maksimal dalam pelayanan.

2. Faktor-faktor yang menghambat Pelaksanaan Sistem Manajemen Registrasi dan Identifikasi (Regident) Kendaraan Bermotor adalah:
 - a) Terbatasnya jumlah personel idealnya pelaksanaan dilapangan seharusnya diemban oleh petugas polisi republik indonesia (Polri) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun, karena personel terbatas jadi menggunakan tenaga pegawai harian lepas;
 - b) Kurang Maksimal dalam Pelayanan, Belum seluruhnya petugas pelaksana yang ada disamping memiliki pengetahuan atau kompetensi dibidangnya;
 - c) Prasarana tidak memadai seperti gedung pengarsipan yang berada di empat tempat lokasi berbeda.

Adapun faktor penghambat dari pemungutan Pajak kendaraan Bermotor yaitu

- a) Faktor internal, dimana terbatasnya anggaran, akibatnya ke sarana prasarana kurang memadai, personel di lapangan khususnya di daerah-daerah, didalam penagihan memerlukan tenaga yg cukup melakukan razia lapangan, razia lapangan memerlukan dana, karena melibatkan polisi;
- b) Faktor Eksternal yaitu kurangnya kesadaran masyarakat (Faktor ekonomi, inflasi), karena dana juga menghambat sosialisasi kemasyarakatan, mobilitasnya kurang.

REFERENSI

- Adhani, A., MAP, A. S. S. S., Anshori, A., Sos, S., Sinaga, C. N. A., Sos, S., ... & Ulayya, A. (2022). Relasi Media dan Kampus (Rekam Jejak FISIP UMSU dalam Tata Kelola Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 dan Masa Pandemi Covid-19) (Vol. 1). umsu press.
- Adhani, A., Anshori, A., & Mahardika, A. (2022). Public Attitudes towards the Government's Policy Communication in Preventing COVID-19. *Jurnal ASPIKOM*, 7(1), 61-70.
- Adhani, A., MAP, A. S. S. S., Anshori, A., Sos, S., Sinaga, C. N. A., Sos, S., ... & Ulayya, A. (2022). Relasi Media dan Kampus (Rekam Jejak FISIP UMSU dalam Tata Kelola Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 dan Masa Pandemi Covid-19) (Vol. 1). umsu press.
- Anshori, A., Sos, S., Kom, M. I., Mahardika, A., Sos, S., MAP, A. S. S. S., ... & Tanjung, Y. (2021). *Isu-Isu Global & Kontemporer Analisis dan Fakta Lapangan* (Vol. 1). umsu press.
- Agus, E., & Ali, K. (2022). Environmental Education for High School and Vocational School of Muhammadiyah City of Medan Based On Islam. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 5(1), 930-937.
- Ali, K., & Saputra, A. (2020). Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Pematang Johar. *Warta Dharmawangsa*, 14(4), 602-614.
- ALI, K. (2018). ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PENCAIRAN DANA DI KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN) PERCONTOHAN YOGYAKARTA (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Ali, K., & Rizky, R. N. (2021). ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PENCAIRAN DANA DI KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN) MEDAN I. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 11(2).
- Hajar, S., & Tanjung, I. S. (2020). Aplicación de un enfoque participativo en el empoderamiento de las aldeas costeras. *Dilemas contemporáneos: Educación, Política y Valores*.
- Hajar, S., Tanjung, I. S., & Yenni, E. (2017, October). Empowerment of Coastal Community Through Village Potential. In *International Conference on Public Policy, Social Computing and Development 2017 (ICOPOSDev 2017)* (pp. 297-299). Atlantis Press.

- Hajar, N. K. D. S., Amrizal, D., Izharsyah, J. R., & Mahardika, A. (2022). *Perencanaan Pembangunan & Pembuatan Kebijakan Daerah: Dari Teori Ke Praktik* (Vol. 1). umsu press.
- Hajar¹, S., Ali, K., & Saputra, A. (2021). Optimalisasi Pelayanan Publik dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa di Desa Pematang Johar. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummanioramania*, 6(1), 136-142.
- Hartanto, D., & Siregar, S. M. (2021). Determinants of overall public trust in local government: Meditation of government response to COVID-19 in Indonesian context. *Transforming Government: People, Process and Policy*.
- Hartanto, D., Hidayat, N., & Sazali, H. (2019, January). The Leadership of Head of the Medan City Police Department in Strengthening Community Systems. In 1st Aceh Global Conference (AGC 2018) (pp. 205-209). Atlantis Press.
- Izharsyah, J. R., & Lubis, F. H. (2020). Analysis of Masterplan in Medan City Determining the Strategic Area (KSK) Social Culture Fields in Medan. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 3(4), 2821-2834.
- Izharsyah, J. R. (2020). Analisis Strategis Pemko Medan Dalam Melakukan Sistem Pengelolaan Sampah Berbasis Open Dumping Menjadi Sanitary Landfill. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummanioramania*, 4(2), 109-117.
- Izharsyah, J. R. (2022, February). Community Social Phenomenon as A Preventive Action and Disaster Mitigation of Longsor Disasters in Simalungun District. In *PROCEEDING INTERNATIONAL CONFERENCE ON LANGUAGE, LITERATURE AND CULTURE* (Vol. 1, p. 397). umsu press.
- Martinelli, I. (2021). Menilik Financial Technology (Fintech) dalam Bidang Perbankan yang dapat Merugikan Konsumen. *Jurnal SOMASI*, 2(1), 32-43.
- Khairiah, N., Rahmi, A., & Martinelli, I. (2021). Management of Overseas Refugees in North Sumatra in the Perspective of Human Security. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(4), 12077-12089.
- Khairiah, N., Rahmi, A., & Martinelli, I. (2021). Management of Overseas Refugees in North Sumatra in the Perspective of Human Security. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(4), 12077-12089.
- Kusnita, N., Wibowo, Y. S., Tanjung, I. S., & Nugroho, R. (2021). Analisis Kebijakan Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar dalam Mendukung Potensi Bisnis Transportasi Laut Kepulauan Riau. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 1(6), 724-734.
- Martinelli, I. (2017). Status Hukum Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/puu-viii/2010. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 308-328.
- Martinelli, I., Khairiah, N., Nasution, N., & Khairani, L. (2021). Socialization of the quality of school graduates to increase society participation in achieving high-quality education. *Community Empowerment*, 6(12), 2303-2314.
- Martinelli, I., Khairiah, N., Nasution, N., & Khairani, L. (2021). Socialization of the quality of school graduates to increase society participation in achieving high-quality education. *Community Empowerment*, 6(12), 2303-2314.
- Mavianti, M., & Rizky, R. N. (2019, October). Upaya Pemanfaatan Bonggol Pisang Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Pada Ibu-Ibu Di Dusun 2 Desa Tanjung Anom. In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* (Vol. 1, No. 1, pp. 138-143).
- MAHARDIKA, A. (2017). TEKNIK PEMBERIAN PAKAN (CAKE) PADA LARVA IKAN KOI (*Cyprinus carpio*) DI INSTALASI BUDIDAYA AIR TAWAR PUNTEN, KOTA BATU, JAWA TIMUR.
- Mujahiddin, M., & Mahardika, A. (2018). Analisis Potensi Konflik antara Pemerintahan Desa dan Masyarakat Pasca Berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 (Studi Kasus pada Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang). *Warta Dharmawangsa*, (55).
- Ramadhani, R., & Ramlan, R. (2019). Perjanjian Build Operate And Transfer (Bot) Lapangan Merdeka Medan Dalam Pandangan Hukum Adminstrasi Negara Dan Hukum Bisnis. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 255-270

- Rahmi, A., Salamah, U., & Khairiah, N. (2021). Edukasi Hukum Berkeadilan Gender Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Bagi Pengurus 'Aisyiyah Di Medan. *ABDI SABHA (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat)*, 2(2), 246-256.
- Rizky, R. N., & Mavianti, M. (2019, October). Keripik Kelapa: Peluang Usaha Baru di Dusun 3 Tanjung Anom, Deli Serdang. In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan (Vol. 1, No. 1, pp. 311-318)*.
- Rizky, R. N., & Moulita, M. (2017). PENANAMAN NILAI-NILAI ISLAM MELALUI KOMUNIKASI INTERPERSONAL ORANG TUA PADA ANAK. *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(2), 206-219.
- Rizky, R. N. (2017). Lembaga Swadaya Masyarakat, Media Massa dan Hak Anak. *JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study (E-Journal)*, 3(2), 87-96.
- Roziqin, A., Adejaya, M. S., & Ali, K. (2019, October). Strengthening local economy through tourism village: Case study in Dukuh Dalem, Sleman Regency. In *IAPA Proceedings Conference (pp. 173-179)*.
- Saputra, A., & Ali, K. (2020). ANALISIS KEBIJAKAN PARIWISATA TERHADAP PENGELOLAAN OBJEK WISATA DI KABUPATEN SAMOSIR. *Warta Dharmawangsa*, 14(4), 564-584.
- Syahputra, B. P., & Tanjung, I. S. (2019). Membangun Sinergi Pusat Karir dan Program Studi Melalui Program Tracer Study dan Pengembangan Karir Lulusan. *Proceeding Indonesian Carrier Center Network (ICCN) Summit*
- Syahreza, M. F., & Tanjung, I. S. (2018). Motif dan Pola Penggunaan Media Sosial Instagram di Kalangan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi UNIMED. *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(1), 61-84.
- Tanjung, H., Handoko, Y., Tanjung, I. S., & Yuniarsa, S. O. (2022, March). CREATIVITY AND INNOVATION IN SMALL BUSINESS: A DIGITAL SYSTEM LITERATURE REVIEW WITH ROUND MAP NEW NORMAL. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies (Vol. 3, No. 1, pp. 795-802)*.
- Tanjung, E. F., Harfiani, R., & Sampedro Hartanto, H. (2021). Formation of Soul Leadership Model in Indonesian Middle Schools. *Educational Sciences: Theory And Practice*, 21(1), 84-97.
- Tanjung, I. S., & Putri, S. P. (2022). Penanggulangan Pandemi Covid-19 Melalui Tindakan Preventif Untuk Mewujudkan Desa Tangguh Covid-19. *ABDI SABHA (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat)*, 3(1), 119-123.
- Tanjung, I. S., Tanjung, H., & Wibowo, Y. S. (2021). Development of Tourism Communication Model Based on Local Wisdom in Padangsidempuan. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(4), 9877-9885.
- Yusni, M., & Asmadi, E. (2020). ENHANCING LITERATURE ON PROCEDURAL JUSTICE AND ORGANIZATIONAL LEARNING: EXAMINING MEDIATING ROLE OF ORGANIZATIONAL LEARNING AND ORGANIZATIONAL TRUST. *Journal of Security & Sustainability Issues*, 10(2).